

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A.K., Wiharyanto, 2009, *Sejarah Indonesia Baru II*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Anwar, C., 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang.

Arifin Hoesein, Zainal, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

\_\_\_\_\_, 2007, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Graifika, Jakarta.

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

BAPPENAS & Departemen Dalam Negeri, 2003, *Buku Pedoman Penguatan dalam Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 1998, *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Mizan, Bandung.

Budiarto, M., 2004, *Kamus Hukum Umum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Dubnick, Melvin, 1998, *Clarifying Accountability: An Ethical Theory Framework*, The Federation Press, Princeton Junction.

Dykstra, Clarence A., 1939, *The Quest for Responsibility*, American Political Science Review.

Fajar Mukti, dan Ahmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Garner, Bryan A., 2000, *Black's Law Dictionary*, West Group, United State of America.
- Garvey, John H., 1999, *Modern Constitutional Theory*, Fourth Edition, West Group, Boston.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Perss, Jakarta.
- Khoo, Gilbert, 1976, *Sejarah Asia Tenggara Sejak tahun 1500*, Fajar Bakti, Kuala Lumpur.
- Koesnoe, H.M., 1998, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut UUDNRI Tahun 1945*, Ubhara Press, Surabaya.
- Krina, Loina Lalolo, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Latief, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Total Media, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Mohammad, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mahkamah Agung, 2003. *Cetak Biru Mahkamah Agung RI*, MA-RI, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Perubahan UUDNRI Tahun 1945 1999-2002 Buku Keempat*, Sekretariat Jenderal, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Bandung.
- M. Echols, John dan Shadily, Hassan, 2010, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhjad, H.M. Hadin dan Nuswardani, Nunung, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publisher, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadardi, dan Nawawi, Martini, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Popper, Karl R., 1972, *Objective Knowledge: An Evolution Approach*, Oxford University Press.

- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Saleh, Imam Anshori, 2014, *Kandasnya Perppu dan Masa Depan MK*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, *Risalah Perubahan UUDNRI Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2001, Buku Tiga*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Siagian, Sondang P., 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soepomo, 1960, *Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*, Noor Komala, Jakarta.
- Stefanus, Kotan Y., 1998, *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara (Dimensi Pendekatan Politik Hukum terhadap Kekuasaan Presiden Menurut UUDNRI Tahun 1945)*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sumai, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang PERPU*, Universitas Muhammdiyah Malang Press, Malang.
- Sumardjono, Maria, S.W. 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Garfindo, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan UUDNRI Tahun 1945, Buku IV, Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Tim Redaksi, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yamin, Muhammad, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet ke-6, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## **B. Hasil Penelitian, Disertasi, Tesis, Jurnal dan Makalah**

- Alkotsar, Artidjo, 1994, "Hak Asasi Manusia dalam Prospek Penegakan Hukum Dewasa ini", *Makalah*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

- Efendi Litolung, Paulus, 2005, “Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim (Tanggapan Terhadap laporan Sementara Penelitian)”, *Makalah*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Fahrurazi, Prim, 2007, “Sengketa Kewenangan antara MA dan MK”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hermawati, Mita, 2015, “Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan, Partisipatif, Objektif, dan Akuntabel oleh Presiden”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Indra Permana, Tri Cahta, 2014, “Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial Pengkajian Konteks Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”, *Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1983, “Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia”, *Disertasi*, Liberty, Yogyakarta.
- Permana, Tri Cahta Indra, 2014, “Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial Pengkajian Konteks Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”, *Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Pompe, Sebastian, 2012, “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung”, *Disertasi*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.
- Saleh, Imam Anshori, 2012, “Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial”, *Laporan Penelitian*, Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Jakarta.
- Santoso, Djoko, 2012, “Peranan dan Kontribusi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Magister Hukum Calon Hakim”, *Makalah*, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Syahuri, Taufiqurahman, 2013, “Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 untuk Mewujudkan Peradilan Bersih”, *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Tohari, A. Ahsin, 2004, “Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan”, *Laporan Penelitian*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Tumpa, Harifin A., “Kata Sambutan Ketua MA RI pada Pembukaan serta Meresmikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, *Makalah*, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Banjarmasin.

Ulya, Zaky, 'Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan dengan Konsep Independensi Hakim (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015)', *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 3, Oktober, 2016.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415).

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/IX/2012, Nomor 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang  
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 tentang Pengujian  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan  
Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap  
UUDNRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang Perkara  
Pengujian Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Umum, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  
Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara terhadap UUDNRI Tahun 1945.

#### **D. Internet**

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, [www.kbbi.web.id/partisipasi](http://www.kbbi.web.id/partisipasi), diakses tanggal  
07-09-2016.

Lingkar LSM, “Defenisi Transparansi”, [http://lingkarlsm.com/defenisi-  
transparansi/](http://lingkarlsm.com/defenisi-transparansi/), diakses tanggal 07-09-2016.

“Objektivitas”, <http://m.artikata.com/arti-342604-objektivitas.html>, diakses  
tanggal 22-09-2016.

Quantum, <http://quantum-hrm.com/main/index.php/pg=content&reqld=1>, diakses  
tanggal 10-09-2016.

Safa’at, Muhammad Ali, “Latar Belakang Perubahan UUD Tahun 1945”, [www.  
safaat.lecture.ub.ac.id](http://www.safaat.lecture.ub.ac.id), diakses tanggal 08-10-2016.

Tim Redaksi, “Prinsip-Prinsip Manajemen”, [http://www.ilmu-ekonomi-  
id.com/2016/07/14-prinsip-prinsip-manajemen.html/m=1](http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/07/14-prinsip-prinsip-manajemen.html/m=1), diakses tanggal  
20-10-2016.

Yulianingsih, “tanggal 4 Januari 1946 Ibukota NKRI Pindah Ke Yogyakarta”,  
[http://www.republika.co.id/berita/breaking-  
news/nasional/11/01/04/156100-tanggal-4-januari-1946-ibukota-nkri-  
pindah-ke-yogyakarta](http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/01/04/156100-tanggal-4-januari-1946-ibukota-nkri-pindah-ke-yogyakarta), diakses tanggal 11-10-2016.